

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam negara yang sedang berkembang. permasalahan mendasar di setiap negara berkembang ialah selain mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi juga mengupayakan pemerataan ekonomi demi tujuan terjadinya kesejahteraan masyarakat yang merata. pemerataan ekonomi biasanya ditandai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di setiap tahunnya (Sukirno, 2006). Negara berkembang sering kali menghadapi dilema dalam memilih prioritas antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menekan ketimpangan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kemajuan suatu negara dalam aspek ekonomi.

Ketimpangan ekonomi sendiri merupakan keadaan nyata yang terjadi di tengah – tengah masyarakat di dunia, hal tersebut yang menyebabkan ketimpangan ekonomi menjadi isu penting untuk ditinjau secara berkala dan memerlukan adanya upaya campur tangan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai usaha dalam rangka menekan ketimpangan ekonomi yang terjadi dari berbagai macam aspek yang ada (Kalalo, 2016).

Negara berkembang seperti Indonesia ini, seringkali terjadi *trade off* antar pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ekonomi. Keinginan pemerintah dengan

realita yang terjadi sering kali bertolak belakang, ketika pemerintah menginginkan terjadi peningkatan salah satu indikator ekonomi, justru hal tersebut mengganggu indikator ekonomi yang lainnya. Hal ini pun terjadi pada pertumbuhan ekonomi dan juga ketimpangan ekonomi, hampir selalu sulit untuk mewujudkan dua hal berjalan secara bersamaan khususnya dalam negara berkembang (Kuncoro, 2003), dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat seharusnya membantu menyelesaikan permasalahan lain pada indikator ekonomi namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahap awal pembangunan justru diiringi dengan permasalahan indikator ekonomi lain seperti ketidakmerataan distribusi pendapatan atau ketimpangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Ketimpangan ekonomi dapat direpresentasikan melalui Indeks Gini atau Gini Ratio. Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Nilai gini ratio sendiri berkisar antara 0 – 1, artinya semakin tinggi nilai Gini Ratio maka hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

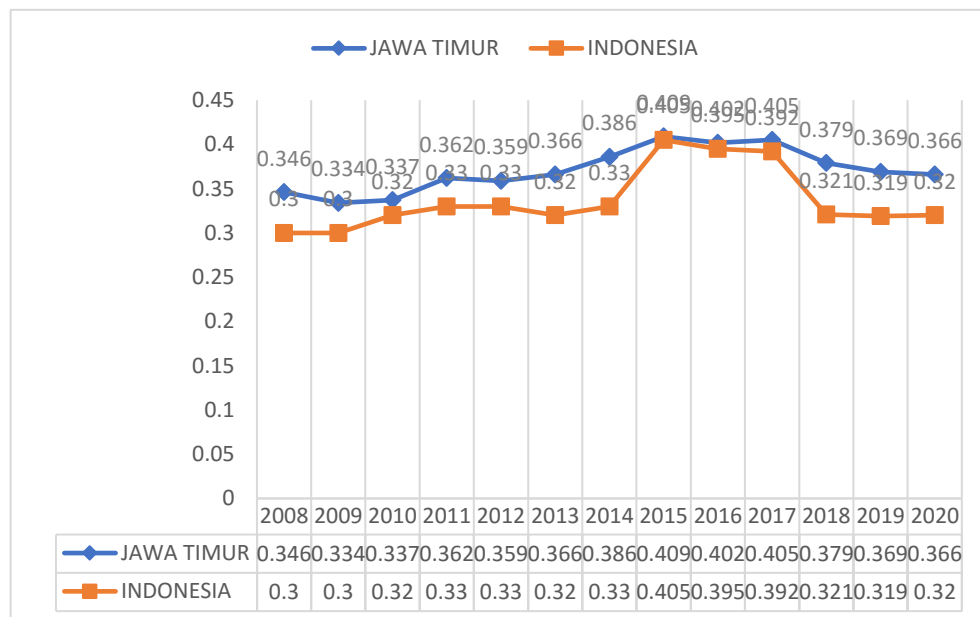
Indikator pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk, baik yang sudah bekerja maupun tidak bekerja secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan total produksi di suatu daerah. Pendapatan nasional merupakan total dari pendapatan seluruh penduduk dibagi dengan total jumlah penduduk. Sehingga penambahan penduduk di setiap tahunnya sangat mempengaruhi total pendapatan nasional di negara. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan penduduk yang terjadi suatu negara dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi sehingga diharapkan dapat menekan ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah tersebut.

PDRB juga merupakan suatu tolak ukur pencapaian keberhasilan ekonomi yang diperlukan pada perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat melalui pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. penanggulangan ketimpangan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi modern.

Meningkatnya jumlah penduduk juga harus diiringi dengan kualitas yang baik. Ketimpangan yang terjadi di suatu negara, khususnya negara berkembang biasanya ditandai oleh kualitas sumber daya manusianya yang kurang memadai. Pertumbuhan ekonomi hanya menjelaskan mengenai peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, namun pada hakikatnya pembangunan manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan (Kuncoro, 2006). Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia.

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat terbilang tinggi, namun dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidakmerataan ekonomi dalam wilayah tersebut. Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa nilai ketimpangan ekonomi yang direpresentasikan oleh indeks gini rasio baik di Indonesia maupun di Jawa Timur yang tergolong dalam lingkup Provinsi sama – sama menunjukkan trend yang meningkat. Gini ratio atau Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan.



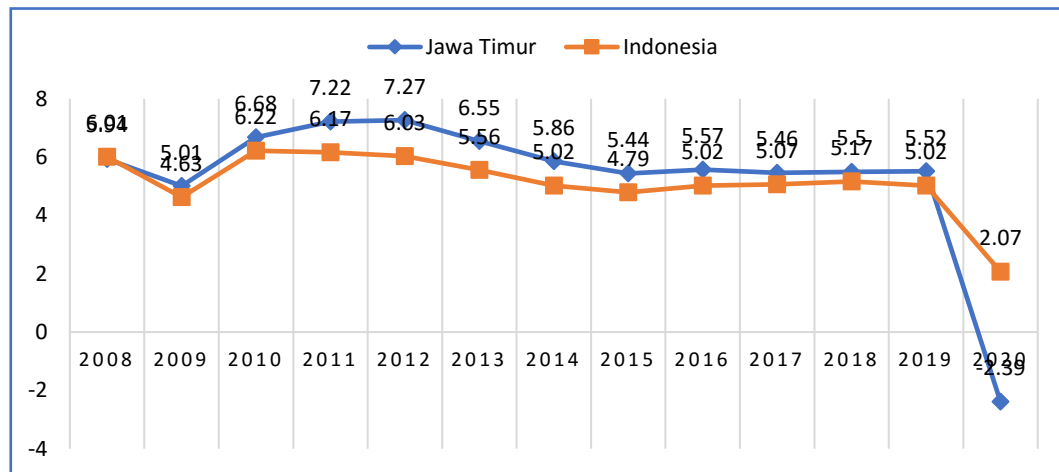
Sumber : Badan Pusat Statistika, 2020

Gambar 1.1. Gini Ratio Indonesia dan Jawa Timur tahun 2008 - 2020

Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2008 – 2020 menunjukkan nilai yang lebih besar dari ketimpangan nasional, meskipun pada tahun 2009 nilai gini ratio mengalami penurunan dari tahun 2008, lalu tahun 2012 juga nilai gini rasio membaik dari tahun 2011 dan tahun 2016 juga terjadi hal serupa, yaitu nilai gini ratio lebih kecil ketimbang tahun 2015 namun jika dilihat secara keseluruhan data gini rasio pada Jawa Timur mengalami trend peningkatan. Hingga pada tahun 2015, Gini Ratio menunjukkan nilai tertinggi, lalu mulai berfluktuasi hingga ditahun 2020 mencapai nilai 0.366.

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota Madya, dengan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dari tahun 2008 – 2020 pernah mencapai angka 7,22% dan 7,27% yaitu pada tahun

2011 – 2012, angka tersebut melebihi rata – rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Jawa Timur Tahun 2008 – 2020

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terdapat di Provinsi Jawa Timur tergolong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebab pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih rata – rata dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya menjadi salah satu pemecahan permasalahan ekonomi yang terjadi, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Hanya saja pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi Covid – 19.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB, sebab PDRB merupakan hasil produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi

yang ditunjukkan dengan nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran yang nyata dari dampak kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dari berbagai macam sektor ekonomi, untuk laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2020 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Nilai PDRB Atas Harga Konstan
2008	305.538,68
2009	320.861,16
2010	342.280,76
2011	366.983,27
2012	393.666,43
2013	1.192.789,8
2014	1.262.684,5
2015	1.331.376,1
2016	1.405.563,5
2017	1.482.299,6
2018	1.563.441,8
2019	1.649.299,1
2020	1.610.419,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan, tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur mencapai angka 40 juta jiwa lebih pada tahun 2020, namun jika dilihat dari pertumbuhan penduduk tiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hal yang bertolak belakang, penambahan penduduk setiap tahun menunjukkan trend penurunan.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 - 2020

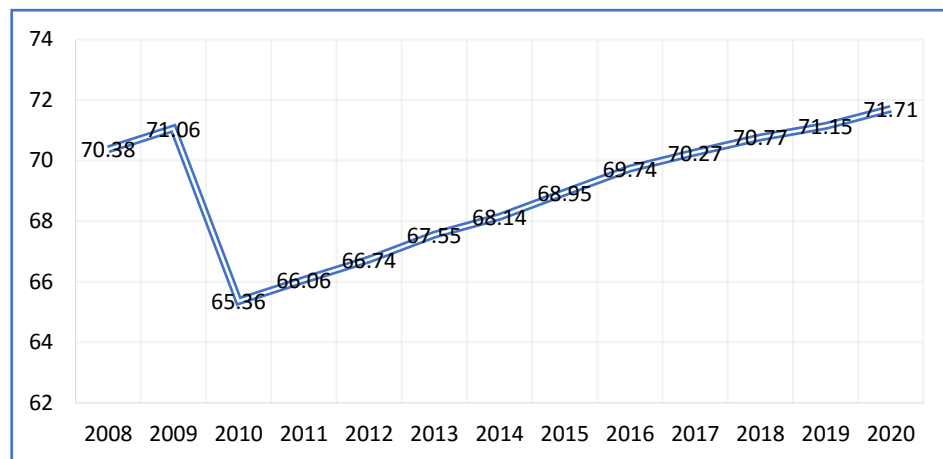
Tahun	Jumlah penduduk	Pertumbuhan penduduk (%)
2008	36.981.001	0.78
2009	37.271.775	0.79
2010	37.565.706	0.79
2011	37.840.657	0.73
2012	38.106.590	0.70
2013	38.363.195	0.67
2014	38.610.202	0.64
2015	38.847.561	0.61
2016	39.075.152	0.59
2017	39.292.972	0.56
2018	39.500.850	0.53
2019	39.698.631	0.50
2020	40.665.696	2,4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi lebih ketat. Jumlah penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada permintaan tenaga kerja menyebabkan pekerja yang notabene masuk dalam kelas bawah mau tidak mau akan dibayar dengan jumlah dibawa standart. Melalui hal inilah pada akhirnya akan menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan. Peningkatan populasi penduduk menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Fulgsang, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur, menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan dengan ketimpangan

pendapatan, semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah dapat menekan ketimpangan yang terjadi.



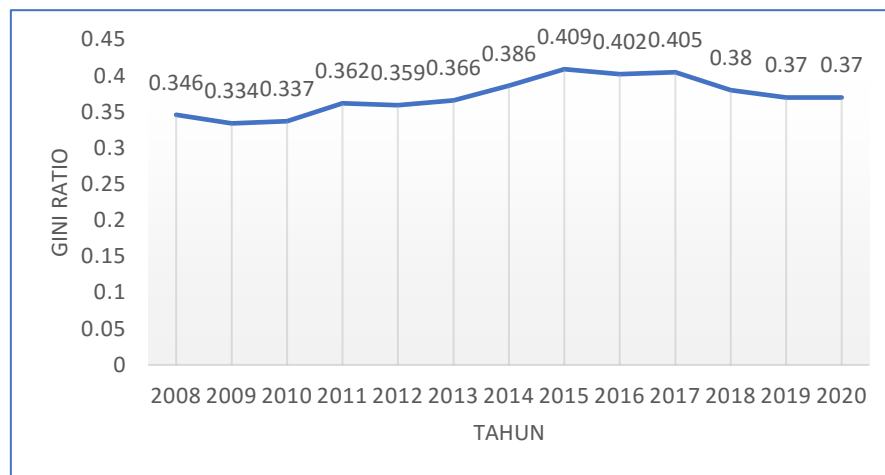
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2020

Gambar 1.3 menunjukkan nilai IPM yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, trend dari gambar diatas menunjukkan peningkatan meskipun puncak pertama IPM Jawa Timur pada tahun 2008 – 2020 terjadi pada tahun 2009 yang mencapai nilai 71,06 dan turun menjadi 65,36 pada tahun 2010, namun pada tahun tahun selanjutnya selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai angka tertinggi yaitu 71,71. Indeks Pembangunan Manusia merupakan penilaian kualitas dasar manusia meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Ketiga indikator yang telah diuraikan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ketimpangan ekonomi yang direpresentasikan

melalui Indeks Gini atau Gini Ratio di Jawa Timur mengalami tren peningkatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah untuk menekan nilai ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 1.4 Gini Ratio Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2020

Menurut Simon Kuznet, mengenai Hipotesis Kuznets yang menerangkan hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, bahwa menurutnya pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan ekonomi, namun pada tahap selanjutnya yaitu pada titik pertumbuhan ekonomi tertentu distribusi pendapatan akan membaik. Artinya pada jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menekan ketimpangan ekonomi. Observasi inilah yang selanjutnya disebut dengan Kurva Kuznets “U – terbalik ” (Todaro, 2003).

Namun pada data yang saya uraikan sebelumnya tidak menunjukkan kesesuaian dengan Hipotesis Kuznets, sehingga dalam penelitian ini ingin melihat

hubungan dari berbagai variabel antara lain PDRB, pertumbuhan penduduk, dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan ekonomi, juga ingin melihat keberlakuan Hipotesis Kuznets di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 – 2020.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan ekonomi, yang artinya saat pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan ekonomi akan mengalami penurunan (Wahyuni, 2004). Hasil dari penelitian Wahyuni juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Panizza (2002) dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan (Nissim, 2007). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lundberg dan Squire (2003) juga menyebutkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi yang di representasikan oleh PDRB, memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan ekonomi.

Hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketimpangan ekonomi, juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Erni, menurutnya semakin bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka ketimpangan di daerah tersebut akan semakin rendah begitupun sebaliknya, sebab menurutnya Jumlah penduduk merupakan faktor pembagi (Kurniasih, 2013). Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Nur, menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hubungan yang positif terhadap pemerataan pendapatan, yang artinya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia maka semakin kecil ketimpangan Ekonominya (Afini, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang maka memunculkan sebuah topik yang akan diteliti, yaitu mengenai " Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2020"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, maka diperoleh Rumusan Masalah sebagai Berikut :

Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap ketimpangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

Besarnya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis, seperti :

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai ketimpangan serta faktor – faktor yang mempengaruhi yang terdapat pada provinsi Jawa Timur.

2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi kepentingan akademisi dalam mengatasi masalah yang sesuai dengan penelitian.

2.) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis, seperti :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran umum mengenai ketimpangan beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya yang terjadi di Jawa Timur.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi.